

# PENGALAKAN PENANAMAN MODAL



DINI GHUZINI

Mahasiswa Ilmu  
Ekonomi dan Studi  
Pembangunan  
Fakultas Ekonomi  
UGM  
Angkatan '95

Salah satu komponen permintaan agregat (*aggregate demand*) adalah investasi atau disebut juga penanaman modal, yaitu keputusan untuk menunda konsumsi hari ini dengan harapan akan mengkonsumsi lebih banyak dimasa datang. Menurut model Keynes, permintaan agregat terdiri dari: pengeluaran untuk *consumption*, *investment*, *government expenditure*, *exspost* dan *import*. Secara matematis dituliskan:  $AD=Y=C+I+G+X-M$ . Dari persamaan dapat dilihat bahwa investasi mempengaruhi tingkat output secara keseluruhan ( $Y$ ). Ada hubungan positif atau berbanding lurus antara *aggregate demand* dan investasi, bila investasi mengalami peningkatan maka tingkat output nasional juga bertambah, berarti terjadi pertumbuhan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh suatu negara, perusahaan, menyebabkan akumulasi modal. Pembangunan gedung-gedung baru, penambahan alat, dan mesin-mesin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Samuelson dan Nordhaus investasi digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: pembelian alat dan mesin, penambahan persediaan serta pembangunan pabrik dan perumahan.

Tinggi rendahnya tingkat investasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang menentukannya yaitu penjualan, biaya/laba dan ekspektasi. Suatu **tingkat penjualan** mempengaruhi besarnya barang-barang modal yang akan digunakan oleh perusahaan. Apabila dimasa yang akan datang diharapkan tingkat penjualan naik, maka perusahaan akan menambah investasinya untuk menghasilkan tambahan penjualan yang terjadi, dalam hal ini yang menentukan besarnya investasi adalah tingkat output (GNP). Jadi besarnya penanaman modal tergantung hasil penjualan dari seluruh kegiatan ekonomi.

Faktor berikutnya adalah **laba** (dapat juga dikategorikan dalam biaya). Laba yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Biasanya barang-barang untuk investasi berumur lebih dari satu tahun sehingga diperlukan penghitungan khusus untuk menentukan biaya. Barang-barang yang berumur panjang biayanya dinyatakan dalam tingkat



bunga pinjaman. Untuk investasi yang menggunakan dana pinjaman, tingkat suku bunga penting diperhitungkan karena merupakan biaya dari dana pinjaman yang digunakan tersebut. Adanya pajak juga mempengaruhi besarnya biaya investasi. Besarnya pajak yang berlainan untuk sektor-sektor yang berbeda membawa dampak pada tinggi rendahnya tingkat investasi.

Faktor ketiga adalah **ekspektasi** terhadap keadaan perekonomian dimasa datang. Bila investor beranggapan keadaan yang akan datang terjadi kelesuan ekonomi, maka mereka enggan melakukan penanaman modal, sebaliknya bila dianggap keadaan ekonomi cerah, mereka akan melakukan penanaman modal untuk memperbesar usahanya. Keputusan investasi yang berdasarkan pada ekspektasi di masa depan sulit ditentukan kebenarannya, hanya tergantung atas pesimisme atau optimisme investor yang bersangkutan. Hal inilah yang menyebabkan volume investasi berubah-ubah sejalan dengan perubahan ekspektasinya.

## **INDIKATOR INVESTASI DI INDONESIA**

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia merupakan tempat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Pasarnya yang besar dan luas ( dengan jumlah penduduk besar) menentukan keputusan investasi asing. Juga banyaknya sumber—sumber alam yang tersedia di Indonesia dan tersedianya tenaga kerja murah dalam jumlah banyak..

Negara-negara ASEAN mempunyai karakteristik relatif sama dan iklim berinvestasi kondusif yang sangat menguntungkan. Semuanya menjalankan sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar, walaupun penerapannya berlainan antara negara satu dengan lainnya, tetapi pada prinsipnya tidak memperbolehkan campur tangan

pemerintah terlalu banyak di sektor swasta. Campur tangan pemerintah sebaiknya hanya membuat seperangkat peraturan dan kebijakan yang stabil dan pasti sehingga dapat menjadi pegangan dalam berusaha Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat agar dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Kebijakan nasional tentang penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut peraturan perundangan-undangan tersebut terdapat bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas untuk penanaman modal. Bila dilihat dari tahun ke tahun besarnya penanaman modal baik PMA maupun PMDN kecenderungan selalu meningkat, walaupun ada beberapa waktu penanaman modal mengalami penurunan. Sebagai contoh pada tahun 1982 dan 1983 penanaman modal mengalami penurunan terutama pada penanaman modal dalam negeri. Penurunan ini salah satunya disebabkan karena terjadinya resesi ekonomi pada tahun tersebut.

## **PENGGALAKAN INVESTASI**

Penanaman modal di Indonesia bersumber dari tabungan, baik tabungan masyarakat maupun tabungan perusahaan serta kredit investasi, dan sisanya diusahakan dari PMDN dan PMA. Dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kebutuhan akan penanaman modal juga lebih besar dari tahun ketahun. Oleh karena itu diperlukan saving



lebih tinggi untuk memenuhinya disamping PMDN dan PMA yang lebih besar pula. Perumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat dicapai dengan mendorong investasi yang mengarah pada pembangunan gedung-gedung, sarana dan prasarana, alat dan mesin-mesin baru.

Penanam modal asing terbesar di Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Hongkong dan Inggris. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa peranan modal asing cukup berarti bagi pembangunan negara kita, terutama peran negara-negara yang telah disebutkan diatas. Dan untuk beberapa dasawarsa mendatang tampaknya peran modal asing masih diperlukan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Urutan pertama dan kedua investor asing di Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Jepang, modal dari Amerika lebih banyak proporsinya yang ditanamkan di sektor energi, sedangkan modal dari Jepang lebih banyak ditanamkan di sektor manufaktur.

Selain mendorong tumbuhnya perekonomian, dampak lainnya adanya penanaman modal adalah memperluas lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan kerja.

Akibat lainnya adalah memberikan sumbangan pada devisa negara, dapat berhubungan dan membangun kontrak dengan negara-negara lain. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, akibat yang penting adalah terjadinya transfer teknologi baru dari negara yang sudah maju bidang teknologinya, serta dapat menjadi

| PMA DAN PMDN YANG DISETUJUI |         |          |
|-----------------------------|---------|----------|
| TAHUN                       | PMDN    | PMA      |
| 1980                        | 908,78  | 71436    |
| 1981                        | 2104,71 | 58570    |
| 1982                        | 1714,15 | 222131   |
| 1983                        | 1751,15 | 1209510  |
| 1984                        | 2629,68 | 1432330  |
| 1985                        | 3749,7  | 970670   |
| 1986                        | 4416,7  | 1362403  |
| 1987                        | 10256   | 2411500  |
| 1988                        | 14915   | 7702726  |
| 1989                        | 19593,9 | 8517434  |
| 1990                        | 59878,4 | 16668940 |
| 1991                        | 41084,4 | 17530065 |
| 1992                        | 29341,7 | 21445160 |
| 1993                        | 39450,4 | 17244332 |
| 1994                        | 53289,1 | 54684511 |
| 1995                        | 69853   | 93999188 |

Sumber: Nota Keuangan Republik Indonesia Tahun 1982-1994

sarana pelatihan dibidang teknik dan bisnis bagi para pekerja dan mendorong bagi para pengusaha untuk lebih mengembangkan usahanya.

Dampak yang terjadi akibat adanya investasi lebih banyak segi positifnya. Investasi memberikan sumbangan penting bagi kesejahteraan rakyat sehingga investasin perlu digalakkan, didorong dan ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat lebih cepat dicapai.



Kita tidak dapat meningkatkan investasi dan masuknya modal asing tanpa menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan penanaman modal yang tetap dan tidak berubah-ubah merupakan kepastian bagi iklim usaha. Kemudahan-kemudahan dalam perijinan untuk investasi atau birokrasi yang efisien dapat mendorong investor menanamkan modalnya.

## RANGKAIAN KEBIJAKAN DAN KENDALA

Pengaturan-pengaturan tentang penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Intervensi pemerintah dalam pengaturan penyebaran aktifitas ekonomi melalui badan ini. Jadi alokasi investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak semata-mata ditentukan oleh pihak investor sendiri, tetapi juga diatur oleh BKPM. Agar tingkat investasi meningkat, pemerintah melalui BKPM harus memberikan kesempatan pihak swasta untuk menanamkan modalnya secara lebih luas. Walaupun tetap melakukan koordinasi, karena bila tidak dilakukan koordinasi masuknya penanaman modal asing dengan teknologi yang dibawanya tidak memenuhi/ tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak sesuai dengan prioritas pengembangan industri. Investasi terutama dari modal asing yang terlalu singkat (dalam waktu yang cepat) dan terlalu banyak dapat mengakibatkan kurang adanya penyesuaian dengan lingkungan setempat sehingga membawa pengaruh -pengaruh negatif.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang mendorong investasi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk merealisasikannya, melalui deregulasi-deregulasi di bidang investasi (iklim usaha). Deregulasi 4 Juni 1996 merupakan deregulasi di bidang ekspor, import dan iklim usaha

(investasi). Antara lain berisi tentang:

- Penurunan tarif bea masuk barang modal.
- Impor barang modal dalam investasi PMA dan PMDN melalui BKPM telah dibebaskan bea masuknya.
- Penyederhanaan perizinan bagi industri di dalam kawasan industri. Industri tidak diwajibkan memiliki perizinan sepanjang telah memperoleh persetujuan PMA dari presiden yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari BKPM bagi PMA, memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM bagi perusahaan dalam rangka PMDN.
- Kelonggaran kegiatan impor bagi perusahaan PMA manufaktur. Mengizinkan impor barang komplementer dari perusahaan afiliasinya di luar negeri yang selama ini tidak diperbolehkan

Deregulasi 7 Juli 1997 merupakan deregulasi di sektor riil yaitu ekspor dan impor,

| RENCANA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)<br>YANG DISETUJUI PEMERINTAH MENURUT NEGARA ASAL<br>(Juta \$) |                    |              |         |         |
|---|--------------------|--------------|---------|---------|
| PERIODE   | AMERIKA<br>SERIKAT | HONG<br>KONG | JEPANG  | INGGRIS |
| 1992  | 922.5              | 10206        | 1,527.7 | 978.2   |
| 1993  | 444.5              | 3841         | 836.0   | 301.1   |
| 1994  | 977.0              | 60417        | 1,562.5 | 2,957.1 |
| 1995  | 2,770.5            | 17633        | 3,792.0 | 6,322.1 |
| 1996  | 642.1              | 11056        | 7,655.3 | 3,390.6 |



penanaman modal, pajak daerah dan redistribusi daerah, penerimaan negara bukan pajak serta sektor moneter. Pemberian fasilitas yang sama dengan perusahaan PMA/PMDN atas impor barang modal dan bahan baku tidak termasuk pembayaran rumah sederhana dan sangat sederhana termasuk juga dalam skema deregulasi. Deregulasi ini berisi antara lain:

- pemindahtanganan barang modal
- pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk bagi barang modal dalam jangka waktu pengiriman melebihi 2 tahun.

Persoalan mengenai iklim usaha sebenarnya lebih rumit diluar kawasan industri, tetapi lebih tertumpu sebaiknya dimulai dari dalam birokrasi, terutama dengan pengurangan aturan-aturan yang berbelit-belit. Biasanya masalah yang muncul tidak hanya persoalan ekonomi saja tetapi juga budaya, politik, dan birokrasi yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Karena masalah sudah sampai bagian ini, maka keputusan-keputusan politis yang lebih mendasar dibutuhkan juga untuk bisnis.

Usaha-usaha untuk meningkatkan investasi disamping dengan dikeluarkannya deregulasi juga dipengaruhi oleh faktor kelengkapan sarana dan prasarana fisik yang tersedia. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai lebih menarik bagi investor. Seperti telah disebutkan diatas, sistem birokrasi dan pegawai negeri yang efisien dan tidak korup juga penting kerana bila birokrasi dan pegawai korup mengakibatkan berbagai gangguan, penyimpanan serta ketidakadilan. Faktor-faktor diatas berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi bagi para investor.

Tentu saja banyak hambatan-hambatan dalam rangka peningkatan investasi. Hambatan yang dirasa paling besar berkaitan dengan

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, yaitu struktur dan sistem masyarakat Indonesia sendiri. Diberbagai sistem dalam masyarakat, misalnya dalam bidang ekonomi masih ada dualisme yang didalamnya terdapat berbagai perbedaan dan kesenjangan. Masuknya suatu modal investasi dalam jumlah besar dan berteknologi tinggi sangat mudah dimanfaatkan oleh golongan tertentu yang lebih kuat kedudukannya sehingga merugikan golongan lemah ataupun rakyat biasa. apabila kemampuan para pengusaha kita belum mampu bersaing dengan para investor asing, sering terjadi pengusaha kita *bargaining position*-nya lemah. Jadi harus dipertimbangkan lebih dahulu kemampuan kita sendiri sebelum membuka kesempatan untuk para investor asing dengan modal yang terlalu besar.

Hambatan lainnya adalah kebanyakan tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja berpendidikan kurang memadai dan tidak terampil, hal ini berpengaruh pada proses transfer teknologi. Proses alih teknologi menjadi berjalan lambat karena terhambat oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki pekerja. Kurangnya sarana dan prasarana memang masih dirasakan dan kesenjangan antar daerah yang besar dapat menghambat investasasi beserta penyebarannya di daerah-daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Samuelson dan Nordhaus, Makroekonomi, 14 edition 1994
2. Dornbusch dan Fisher, Makroekonomi, 14 edition 1987
3. Warta Ekonomi, No 04/VIII/17 Juni 1996
4. Bisnis Indonesia, 8 Juli 1997
5. Prisma I, 1985
6. Prisma 5, 1985
7. Prisma 7, 1984
8. Prisma 7, 1983